

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO  
EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI  
PADA KANTOR DESA SIPAI  
KABUPATEN MAMASA**

**Disusun Oleh:**

**KESIA KARMITA K**

**NIM:4519012007**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa

Nama Mahasiswa : Kesia Karmita K

Stambuk/NIM : 4519012007


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen Keuangan

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Miah Said, SE., M.Si.**

  
**Dr. Abdul Karim, SE., MM**

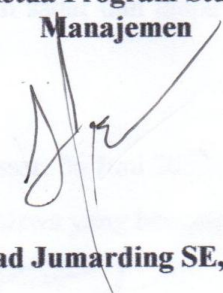
**Mengetahui Dan Mengesahkan**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi  
Manajemen**

  
**Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM**

  
**Ahmad Jumarding SE.,MM**

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kesia Karmita K

NIM : 4519012007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 06 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan

  
Kesia Karmita K

## PRAKATA

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindungan-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan akal yang sehat. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan Menyusun skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, perhatian, kasih sayang, motivasi, bimbingan, dukungan, dan doa tanpa pamrih.
3. Bapak Prof. Dr. Ir Batara Surya ST. M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan Kepada Penulis untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan selama kurang lebih empat Tahun
4. Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa beserta jajarannya.
5. Ahmad Jumarding SE.,MM selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan arahan dan pembelajaran selama perkuliahan.

6. Dr. Miah Said SE. M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abdul Karim, SE., MM selaku pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.
9. Kepala Desa Sipai, Bapak Marthen dan jajarannya yang telah mengizinkan dan mendukung penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir.
10. Untuk saudara Penulis, Marwan yang selalu mendukung, memotivasi, mengarahkan dan selalu setia membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Segenap keluarga besar yang telah mendukung, memberikan semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Teman-teman seangkatan Manajemen 2019, yang telah berjuang Bersama dari awal semester. Terima kasih atas kerja samanya dan dukungan satu sama lain.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah serta penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kekurangan dalam Skripsi ini penulis mohon maaf. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak

Makassar, 06 Juni 2023

Kesia Karmita K



## **ABSTRAK**

KESIA KARMITA K. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa. (Dibimbing oleh Dr. Miah Said, SE., M.Si dan Dr. Abdul Karim, SE.,MM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 sampai Tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa masih belum cukup baik karena pada analisis menggunakan rasio efektivitas hasilnya masih kurang efektif yaitu 79,88%, namun pada rasio efisiensi hasilnya cukup efisien yaitu sebesar 69,35%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

## **ABSTRACT**

*KESIA KARMITA K. Financial Performance Analysis of Village Fund Allocation Management Based on Effectiveness Ratios and Efficiency Ratios at the Sipai Village Office, Mamasa Regency. (Supervised by Dr. Miah Said, SE., M.Si and Dr. Abdul Karim, SE., MM).*

*This study aims to determine how effective and efficient the Financial Performance of Village Fund Allocation Management is based on the ratio of effectiveness and efficiency ratio at the Sipai Village Office, Mamasa Regency. This study uses a quantitative approach. The data processed is the Village Fund Allocation Financial Report (ADD) in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) from 2020 to 2022.*

*The results of this study indicate that the financial performance of the Sipai Village Government, of Mamasa Regency is still not good enough because in the analysis using the effectiveness ratio the results are still less effective, namely 79.88%, but for the efficiency ratio the results are quite efficient, namely 69.35%.*

**Keywords:** *Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEORSINILAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Lingkup Penelitian.....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	7
1. Manajemen Keuangan.....	7
2. Tujuan Manajemen Keuangan.....	9
3. Analisis Laporan Keuangan.....	10
4. Analisis Kinerja Keuangan.....	12
5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	15
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	24
7. Rasio Keuangan.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Hipotesis.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel .....	34
D. Instrument Penelitian .....	35
E. Variabel Penelitian .....	35
F. Jenis dan Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Definisi Operasional.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat.....	40
2. Visi Dan Misi .....	41
3. Struktur Organisasi.....	42
4. Uraian Tugas .....	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
1. Analisis Kinerja Keuangan Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa .	49
2. Hasil Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi .....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penilaian Efektivitas .....	29
2.2 Penilaian Efisiensi.....	29
2.3 Penelitian Terdahulu .....	30
4.1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2020 .....	50
4.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2021 .....	51
4.3 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2022 .....	52
4.4 Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	54
4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa .....	55
4.6 Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Desa Sipai Kabupaten Mamasa .....	57
4.7 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa...	58

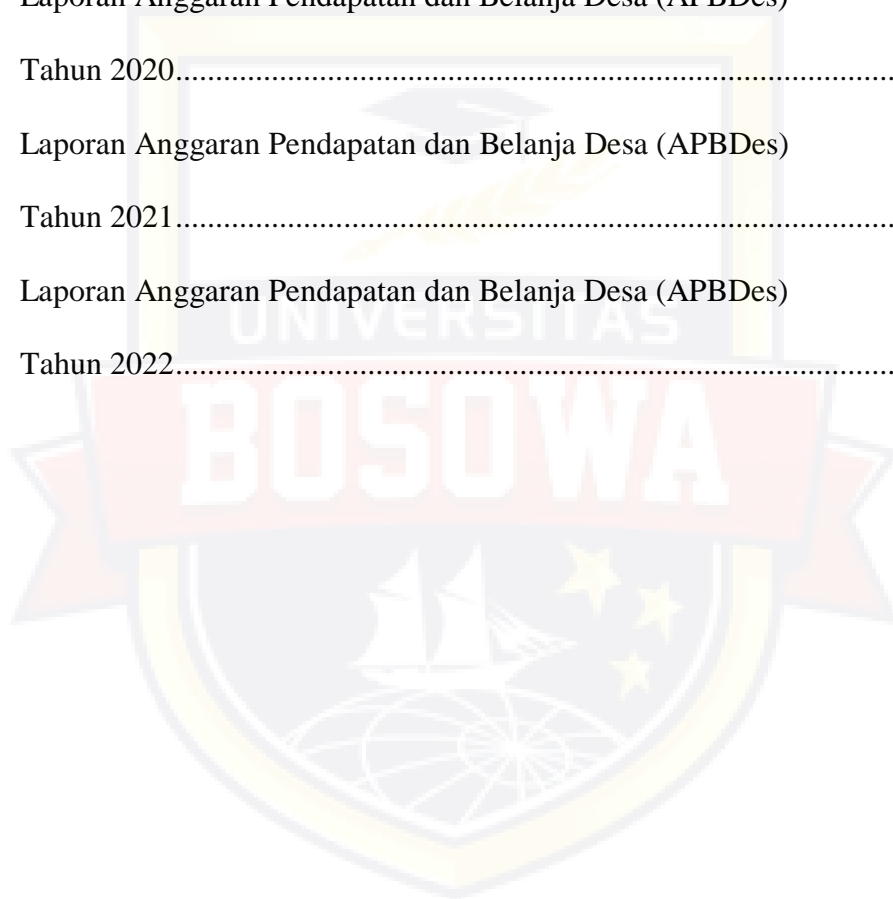
## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Pikir .....	32
4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	63
2. Surat Rekomendasi Penelitian.....	64
3. Surat Keterangan Penelitian .....	65
4. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
Tahun 2020.....	66
5. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
Tahun 2021.....	69
6. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
Tahun 2022.....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada dan itulah yang masih marak diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat yang ada di Desa Sipai mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan kinerja keuangan desa sipai belum dijalankan dengan baik dan efisien.

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Hingga detik ini, bangsa ini masih belum lepas dari cengkeraman korupsi. Dengan fakta banyaknya kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara akibat menyalahgunakan dana desanya. Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa

memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu

3 tahun terakhir (tahun 2020-2022). Selain itu, untuk menumpulkan data-data sebagai informasi mengenai kinerja keuangan pada Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimana kinerja keuangan Desa Sipai Yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2022 dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020-2022 di Desa Sipai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diukur melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2022 dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui perencanaan masalah maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran bagi Instansi desa dalam menentukan arah dan strategi dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah desa serta sebagai pedoman pengelolaan alokasi dana desa.

##### 3. Bagi Almamater

Untuk menambah pengetahuan dan informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk referensi dalam penelitian yang serupa.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka penulis membahas masalah dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan, Didalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, dan pada setiap bab berisi beberapa sub bab dengan penjelasan sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN** berisi pendahuluan mengenai keseluruhan proposal. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang penelitian ini dan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian pada bab satu ini dijelaskan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian dimana tujuan penelitian menjelaskan mengenai hal yang ingin didapatkan dalam penelitian ini, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan apa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini baik untuk peneliti dan maupun untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan dimana pada sistematika pembahasan dijelaskan mengenai uraian singkat dari setiap bab yang ada di skripsi ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi empat pokok pembahasan yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis. Pada telaah Pustaka dijelaskan mengenai acuan-acuan dan penelitian terdahulu. Pada bagian dasar teori dijelaskan mengenai teori-teori yang relevan yang digunakan untuk memprediksi fenomena atau fakta sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian di bagian kerangka pikir disajikan mengenai gambaran atau model penelitian yang akan dilakukan dalam untuk masing-masing variabel. Yang terakhir yaitu hipotesis yang menjelaskan bagaimana hasil penelitian pada Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi mengenai metode penelitian. Pada bab tiga ini mencakup sepuluh pokok pembahasan yaitu: jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, definisi operasional dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berisi mengenai pembahasan hasil penelitian di Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa selama periode 2020-2022.

**BAB V PENUTUP**, berisi mengenai hasil kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga membahas mengenai saran yang diajukan ke Pemerintah Desa dan juga untuk Peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Manajemen Keuangan**

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya untuk apa dikelola dan siapa yang bertindak sebagai pengelola. (Athoillah, 2013).

Manajemen dalam bahasa inggris, artinya to manage, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan dimana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya organisasi yang dimiliki (Malayu S.P. Hasibuan).

Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuannya,

perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan operasional di perusahaannya dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut (Wiratna Sujarwen, 2017).

Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemerolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti perbankan, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang.

Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen Keuangan mengatakan bahwa dalam mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) kita diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana (*financing decision*), dan keputusan

kebijakan deviden (*dividend policy*) yang biasa juga disebut keputusan pembagian keuntungan (*distribution decision*), (Musthafa, 2017)

## 2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambahan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan.
- b. Menjaga arus kas, setiap hari perusahaan mengeluarkan dana misalnya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji anggota atau karyawan, sewa dan pembayaran lainnya. Sehingga jika tidak diawasi dan tidak dikendalikan bisanya menyebabkan over budget yang merugikan.
- c. Mempersiapkan struktur modal, menyeimbangkan antara pembiayaan yang dimiliki dengan dana pinjaman yang bertujuan untuk mempersiapkan struktur modal.
- d. Memaksimalkan pemanfaatan keuangan perusahaan, manajemen keuangan bertugas untuk mengawasi penggunaan uang perusahaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan perusahaan dapat dipangkas dan dialokasikan untuk kegiatan lainnya.
- e. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan, manajer keuangan berupaya untuk memberikan deviden semaksimal mungkin kepada pemegang saham dan berusaha untuk meningkatkan pasar saham karena berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

- f. Meningkatkan efisiensi, manajer keuangan berupaya untuk meningkatkan efisiensi semua departemen dalam organisasi. Penyaluran dana yang tepat dalam peningkatan efisiensi perusahaan.
- g. Memastikan kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan bisa bertahan hidup dalam persaingan bisnis yang kompetitif merupakan peranan dari bagian keuangan. Keputusan yang berhubungan dengan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati karena kesalahan penggunaan keuangan bisa mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan.
- h. Mengurangi resiko operasional, dengan manajemen keuangan yang baik maka risiko operasional akan dapat diminimalisir. Resiko ketidakpastian dalam bisnis harus disikapi dengan keputusan yang tatap oleh manajer keuangan.
- i. Mengurangi biaya modal, perencanaan struktur modal harus dibuat sedemikian rupa oleh manajer keuangan agar penggunaan biaya modal dapat diminimalisir.

### **3. Analisis Laporan Keuangan**

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat

mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan kedepan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini. (Kasmir, 2011).

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:



- a. untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
- d. untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- f. dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

#### 4. Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu, (Irham Fahmi, 2014).

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Indra Bastian).

Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik (Wiratna Sujarweni, 2017).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.

- c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu., (Jumingan, 2004, dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan).

Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun (Wiratna Sujarweni, 2017).

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio

hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah. (Hery, 2014).

Menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Wiratna Sujarweni, 2017)

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kinerja keuangan adalah proses menghitung, mendeskripsikan, dan memberi solusi terhadap hasil kerja yang dicapai suatu instansi pada periode tertentu.

## 5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

### a. Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Melalui Undang-undang desa, desa telah di perkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa juga dapat memberikan sumber-sumber pendapatan. Keuangan desa terdiri atas:

1) Pendapatan

a) Pendapatan Asli desa

- Hasil Usaha Desa
- Hasil Kekayaan Desa
- Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

- Lain-lain pendapatan asli daerah
- b) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
- c) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- d) Penerimaan bagi hasil pajak kabupaten/kota
- e) Penerimaan dana dari pemerintah
- 2) Belanja Desa
- a) Kelompok Belanja Langsung
- Belanja pegawai atau penghasilan tetap
  - Belanja kesejahteraan bagi kepala desa maupun aparat desa
  - Belanja tunjangan
  - Belanja subsidi
  - Belanja hibah
  - Belanja bantuan social
  - Belanja bantuan dana
  - Belanja yang tidak terduga
- b) Kelompok Biaya Tidak Langsung
- Belanja pegawai
  - Belanja barang/jasa
  - Belanja modal

### 3) Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan

#### b. Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- 3) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

- 1) Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
- 2) Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- 3) Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau



masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.

- 2) Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
- 3) Desa maju atau Desa mandiri yaitu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lambung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

c. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (UU No. 6 Tahun 2014). Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat.

Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (DJBPD, 2016).

Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti

yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Diansari, 2015).

c. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, (Marselina Ara Lili, 2018).

Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sarasannya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah:

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat,
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum,
- 3) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- 4) Alokasi dana desa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

### a. Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, (Wijaya, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Desa yang bersumber dari pendapatan Desa, (Jan Hoesada, 2019). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara implisit bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan

informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa kepada Masyarakat dan Pemerintah atas pengelolaan dana Desa pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa, (Laily, 2018)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang memuat penerimaan dan pengeluaran desa serta merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi kepada desa atas segala aktivitas dan kegiatan desa selama satu tahun.

b. Penyusunan Rencana APBDes

Setelah RKP Desa ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa menjadi pedoman proses penganggarannya.

Secara umum proses penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris desa Menyusun rencana Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa
- 3) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas Bersama dan disepakati.

- 4) Rencana Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah disepakati Bersama lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.
- 5) Bupati menetapkan hasil evaluasi dan Rencana APBDes paling lambat 20 hari sejak diterima Rencana Peraturan Desa tentang APBDes. Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu. Peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- 6) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

c. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan keuangan desa harus ditaati melalui penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Semua pengeluaran dan penerimaan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa yang diterima oleh bendahara desa harus disetor ke rekening kas desa, pendapatan tersebut merupakan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan dalam desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat. APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan yang direncanakan biasa dilaksanakan

APBDes dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dimiliki berdasarkan peraturan yang berlaku.

d. Perubahan APBDes

APBDes yang telah ditetapkan memiliki kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran. Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja.
- 2) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Pada tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- 3) Penambahan dan pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- 4) Peristiwa khusus yang meliputi bencana alam, kritis public, kritis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- 5) Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah desa.

## 7. Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan Desa

Rasio keuangan merupakan suatu Teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun dalam laporan posisi keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan.



Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah satu akun dengan jumlah akun lainnya dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan metode analisis rasio ini dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

## 2. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu Teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun dalam laporan posisi keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan.

Rasio keuangan bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

### a) Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ropa, 2016).

Pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Penilaian Efektivitas**

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	diatas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%

b) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Mahmudi (2016:143)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja Desa}}{\text{Realisasi pendapatan Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Penilaian Efisiensi**

Kriteria	Persentase
Tidak Efisien	100% katas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	605 – 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

**Table 2.3 Penelitian Terdahulu**

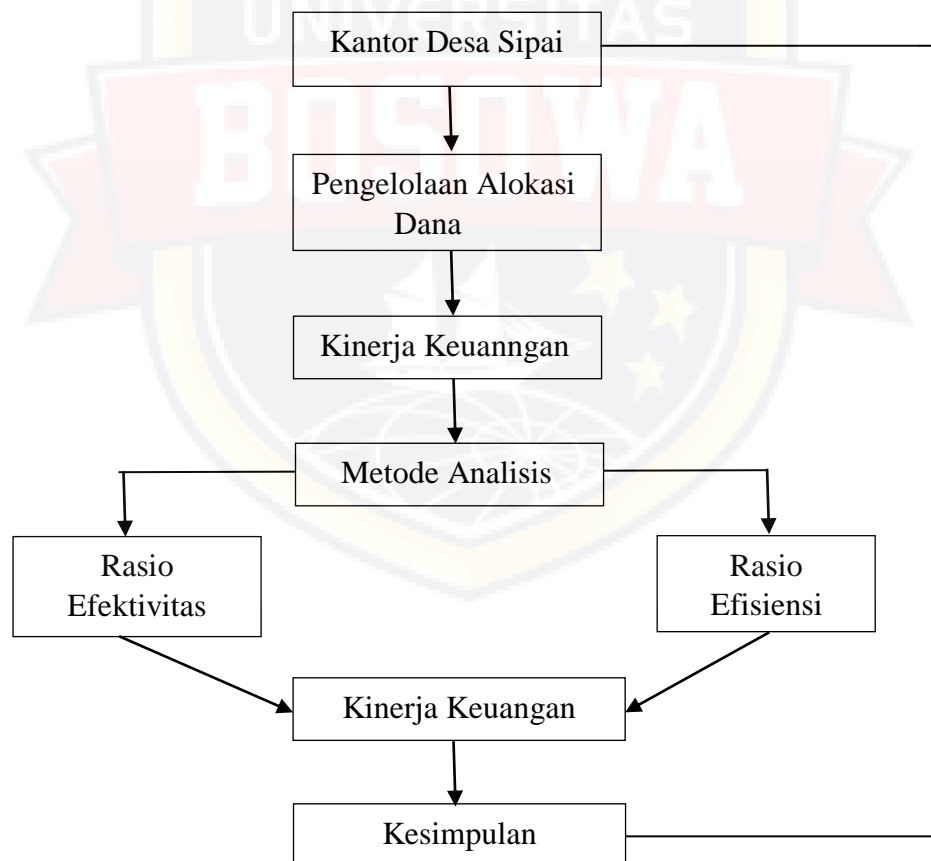
No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Yayu Sri Eva, tahun 2019	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%.

		Soppeng		Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%.
2.	Mutia Sumarni, tahun 2020	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R2 adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 %
3.	Kiki Dwi Shinta Tahun 2019	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) baik tetapi tidak untuk setiap tahun, karena masih banyak kekurangan di Desa Sei Alim Ulu ini namun secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan
4.	Rati Pundissing Tahun 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Lembang Bau Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R2 adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap

	Toraja	variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 %
5.	Arinda Puspita p, Firman Manne dan Adil Setiawan (2021)	Analisis kinerja keuangan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa (Periode 2018-2020)
		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa pada periode 2018-2022 dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang buruk karena total belanja tidak langsung sebesar 51% sedangkan total belanja langsung sebesar 49%. Dilihat dari analisis Efektivitas, dapat dikatakan efektif dengan total sebesar 99%. Sementara analisis efisiensi dapat dikatakan efisien dengan total sebesar 99%.

### C. Kerangka Pikir

Analisis Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Desa perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Desa, ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi. Dengan melihat hasil rasio tersebut maka akan dapat diketahui Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Desa pada Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

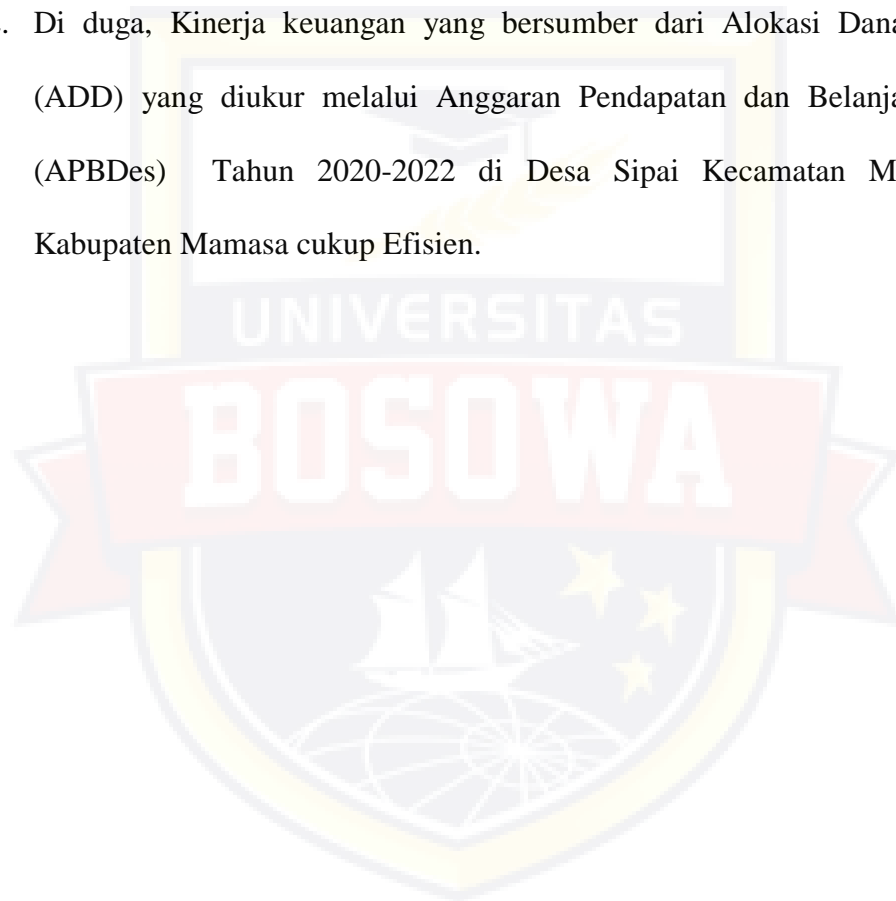


**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang dibuat adalah diduga bahwa:

1. Di duga, Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa sudah cukup Efektiv.
2. Di duga, Kinerja keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2022 di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa cukup Efisien.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2019)

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana dan seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.



Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

#### **D. Instrument Penelitian**

Instrument adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan di permudah olehnya, (Arikunto, 2000). Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian, kemudian instrument lain dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **E. Variable Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini ialah pengelolaan keuangan desa yaitu data keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Tahun 2020-2022.

#### **F. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung secara nyata. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan untuk pembangunan Desa, jumlah Alokasi Dana Desa

(ADD) yang diterima, serta berapa banyak Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi (Indriantoro & Supomo, 2018).

## **2. Sumber Data**

Didalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Berikut penjelasannya:

### **a) Data primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari data dilapangan. Dalam hal ini sumber data yang dimaksud adalah Kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi sebagaimana pelaksana tugas pengelolaan dana desa di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa data ini memerlukan pengelolaan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah pengamatan atau observasi terhadap laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan laporan yang bersumber dari Lembaga yang terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian atau sumber data yang diperoleh berasal dari hasil bacaan atau kajian Pustaka, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan arsip serta

laporan yang bersumber dari lembaga yang terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu jurnal.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik dokumen dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2022 dan profil Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan efektivitas penggunaannya berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020-2022.
2. Setelah memperoleh data, data tersebut diolah guna mengetahui:
  - a. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan rumus:

$$EFEKTIVITAS = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan} \text{ (Realisasi Anggaran Belanja ADD)}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

- b. Efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian rasio efisiensi menggunakan rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja Desa}}{\text{Realisasi pendapatan Desa}} \times 100\%$$

3. Menetapkan rasio efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan menjabarkan serta menjelaskan data yang telah dikelola yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022.

## I. Definisi Operasional

Definisi operasional Kantor Desa Sipai kabupaten mamasa dan pengukurannya, sebagai berikut:

### 1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat menjadi ukuran keberhasilan suatu desa selama periode tertentu. Kinerja keuangan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah Desa Sipai telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan pada Kantor Desa Sipai dihitung dari alokasi dana desa yang diterima dari Kabupaten/Kota, kemudian alokasi dana desa tersebut dianalisis menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

#### a. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah desa sipai dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa

(ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sipai untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat

Desa Sipai merupakan Desa pemekaran dari Desa Messawa yang dimana pada awalnya merupakan salah satu Dusun dari Desa Sepang dan masih bergabung dengan Desa Malimbong, Desa Matande dan Desa Tanete Batu. Seiring berjalannya waktu pada Tahun 1993 terjadi pemekaran Desa yaitu Desa Malimbong dan Desa Sipai. Kemudian pada Tahun 2004 tokoh Masyarakat Bersama dengan Masyarakat Desa Sepang mengadakan adanya pemekaran Desa dari Desa Sipai dan Desa Sepang. Berawal dari rencana tersebut Masyarakat dengan tidak mengenal lelah terus berusaha untuk mewujudkan terbentuknya pemekaran Desa tersebut sekalipun banyak hambatan dan rintangan yang dilalui. Maka dimekarkanlah menjadi dua Desa Sipai dan Desa Sepang.

Desa Sipai memiliki luas wilayah  $\pm 14 \text{ km}^2$  dengan ketinggian  $\pm 853$  m diatas permukaan laut. Desa Sipai terbagi menjadi 4 Dusun yakni Dusun Bau, Dusun Lembang Mandalan, Dusun Kadinginan dan Dusun Garonggong. Penduduk Desa Sipai tidak terlalu padat saat ini jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Sipai mencapai 260KK. Mata pencaharian utama di Desa Sipai adalah sebagai petani dan pekebun.

## 2. Visi dan Misi Kantor Desa Sipai

### a. Visi

Visi Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”

### b. Misi

- 1) Untuk mewujudkan visi Desa Sipai yang di atas, dengan pertimbangan potensi dan hambatan baik internal dan eksternal, Misi Desa Sipai sebagai terdiri dari:
- 2) Mewujudkan moralitas spiritual melalui bidang agama dan budaya
- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan penataan perairan, perbaikan jalan tani, pemupukan, dan memperbaiki kondisi tanaman.
- 4) Menata Pemerintah Desa Sipai yang baik kompak dan bertanggung jawab dan mengemban amanat masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat tepadu dan kerakyatan.
- 6) Pembinaan dan kerja sama dengan kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan petani.
- 7) Bekerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan di dalam melestarikan Lingkungan Hidup.
- 8) Membangun dan membina kemajuan baik pendidikan formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh

warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausaha).

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sipai Kabupaten Mamasa**



#### 4. Uraian Tugas

##### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekertaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan:
  - Melaksanakan urusan tata naskah
  - Administrasi surat menyurat dan ekspedisi, dan
  - Pengelolaan Arsip
- 2) Melaksanakan urusan umum, meliputi:
  - Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
  - Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa
  - Penyediaan prasarana kantor desa
  - Penyiapan rapat-rapat
  - engadministrasian aset dan inventarisasi

- Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
- pelayanan umum.

3) Melaksanakan urusan keuangan, meliputi: ➤

- Pengurusan administrasi keuangan
- Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan juga  
pengeluaran

- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan, meliputi:

- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
- Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- Melakukan monitoring dan evaluasi program

c. Bendahara Desa

Bendahara desa bertugas untuk menerima dana, menyimpan dana desa, mengelola, menyetor, melakukan pembayaran dan bertanggung jawabkan keuangan desa dalam kerangka APBDes.

d. Kepala Urusan dan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, kepala urusan tersebut meliputi:

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas untuk:

- a) Melaksanakan urusan tata naskah
- b) Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi,
- c) Pengelolaan arsip desa,
- d) Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
- e) Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa,
- f) Penyediaan prasarana kantor,
- g) Penyiapan rapat-rapat,
- h) Pengadministrasian aset dan inventarisasi,
- i) Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
- j) Pelayanan umum.

2) Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

e. Kepala Urusan Keuangan

1) Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan dan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan hokum.

2) Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi keuangan Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan badan pemerintahan desa lainnya.

f. Kepala Urusan Perencanaan

1) Tugas Pokok Kepala Urusan Perencanaan

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan inventarisasi data untuk pengembangan, melakukan pemantauan dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

g. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun yaitu membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan yakni pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

h. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan teknis, pelaksanaan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain itu Kepala Seksi Pemerintahan juga bertugas melaksanakan manajemen

tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam Menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

i. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas dari Kepala Seksi Pelayanan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana operasional dan tugas lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan serta melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

j. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Kinerja Keuangan Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa**

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Desa pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari data tersebut nantinya akan dapat memberikan gambaran informasi mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kinerja keuangan Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa selama kurun waktu Tiga Tahun terakhir (Tahun 2020-2022). Berikut adalah data-data yang diambil dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa:

**Tabel 4.1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDes) Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan transfer	1.125.083.600	1.114.276.600	
Dana Desa	781.962.000	771.155.000	
Alokasi Dana Desa	285.689.000	285.689.000	
Bantuan keuangan kabupaten kota	57.432.600	57.432.600	
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.125.083.600</b>	<b>1.114.276.600</b>	
<b>Beanja</b>			
a) Bidang penyelenggara pemerintah desa	343.121.600	343.121.600	ADD, PBK
b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	16.800.000	420.155.000	DDS
c) Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	765.162.000	351.000.000	DDS
<b>Jumlah belanja</b>	<b>1.125.083.600</b>	<b>1.114.276.600</b>	
<b>Surplus/(defisit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Tabel 4.2 Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDes) Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan transfer	1.092.668.400	1.092.668.400	
Dana Desa	715.449.000	715.449.000	
Alokasi Dana Desa	362.861.250	302.733.394	
Bantuan keuangan kabupaten kota	14.358.150	14.358.150	
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.092.668.400</b>	<b>1.032.540.544</b>	
<b>Bebanja</b>			
d) Bidang penyelenggara pemerintah desa	374.819.400	315.091.544	ADD, PBK
e) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	413.580.000	413.580.000	DDS
f) Bidang pembinaan kemasyarakatan	2.400.000	2.000.000	ADD
g) Bidang pemberdayaan masyarakat	13.869.000	13.869.000	DDS
h) Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	288.000.000	288.000.000	DDS
<b>Jumlah belanja</b>	<b>1.092.668.400</b>	<b>1.032.540.544</b>	
<b>Surplus/(defisit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tabel 4.3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)****Pemerintah Desa Sipai Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan transfer	1.071.637.856	494.251.856	
Dana Desa	715.850.000	315.860.000	
Alokasi Dana Desa	355.787.856	178.391.856	
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.071.637.856</b>	<b>494.251.856</b>	
<b>Bebanja</b>			
a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	352.987.856	177.554.461	ADD
b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	254.705.000	17.225.000	DDS
c) Bidang pembinaan kemasyarakatan	2.800.000	400.000	ADD
d) Bidang pemberdayaan masyarakat	165.945.000	0,00	DDS
e) Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	295.200.000	147.600.000	DDS
<b>Jumlah belanja</b>	<b>1.071.637.856</b>	<b>342.779.461</b>	
<b>Surplus/(defisit)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.472.395</b>	
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>151.472.395</b>	

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan laporan Anggaran (APBDes) Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.125.083.600 dan anggaran belanja sebesar Rp.1.125.083.600 berarti bahwa anggaran pendapatan sama dengan

anggaran belanja Desa. Kemudian pada Tahun 2021 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.092.668.400 dengan anggaran belanja yang juga sama dengan jumlah anggaran pendapatan desa. Dan pada Tahun 2022 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.071.637.856 dengan anggaran belanja yang jumlahnya juga sama dengan anggaran pendapatan.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat realisasi pendapatan Desa Sipai pada Tahun 2020 sebesar Rp.1.114.276.600 dan yang terealisasi untuk belanja Desa sebesar Rp.1.114.276.600 sama dengan jumlah realisasi pendapatan Desa. Pada Tahun 2021 realisasi pendapatan sebesar Rp.1.032.540.544 dan yang terealisasi untuk belanja Desa juga sama dengan pendapatan realisasi Desa. Kemudian Tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar Rp.949.251.856 dan yang terealisasi untuk belanja Desa juga sama dengan pendapatan realisasi desa.

Dari data diatas dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa selama kurun waktu tiga Tahun terakhir (Tahun 2020-2022).

## 2. Hasil Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

### a. Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintahan Desa Sipai Kabupaten Mamasa dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah 90-100%. Apabila anggaran yang disediakan hamper sama dengan yang direalisasikan dapat membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu

desa berjalan dengan baik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi ADD (Rp)</b>	<b>Anggaran ADD(Rp)</b>
2020	1.114.276.600	1.125.083.600
2021	1.032.540.544	1.092.668.400
2022	494.251.856	1.071.637.856

*Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sipai Kabupaten Mamasa*

Perhitungan rasio efektivitas Kantor Desa Sipai Kabupaten

Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.1.114.276.600}}{\text{Rp.1.125.083.600}} \times 100\% = 99,03\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.1.032.540.544}}{\text{Rp.1.092.668.400}} \times 100\% = 94,49\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp.494.251.856}}{\text{Rp.1.071.637.856}} \times 100\% = 46,12\%$$

**Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Desa Sipai  
Kabupaten Mamasa**

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	Rp.1.114.276.600	Rp.1.125.083.600	99,03%	Efektif
2021	Rp.1.032.540.544	Rp.1.092.668.400	94,49%	Efektif
2022	Rp.494.251.856	Rp.1.071.637.856	46,12%	Tidak efektif
Rata-rata Rasio Efisiensi			79,88%	Kurang efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBDes

Dari hasil perhitungan diatas, dalam kurun waktu tiga Tahun, rasio efektivitas pemerintah Desa Sipai mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas tertinggi Desa Sipai yaitu pada Tahun 2020 yaitu sebesar 99,03% yang dikategorikan efektif. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 94,49% yang juga dikategorikan efektif. Dan pada Tahun 2022 rasio efektifitasnya mengalami penurunan yang sangat rendah yaitu sebesar 46,12% yang dikategorikan tidak efektif.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Sipai dikategorikan kurang efektif karena rata-rata efektifnya dibawah 80% yaitu 79,88%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Sipai dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan belum dijalankan dengan baik.

#### b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Rasio efiseiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja Desa}}{\text{Realisasi pendapatan Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 4.6 Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Desa Sipai  
Kabupaten Mamasa**

Tahun	Realisasi belanja desa (Rp)	Realisasi pendapatan desa (Rp)
2020	Rp.1.114.276.600	Rp.1.114.276.600
2021	Rp.1.032.540.544	Rp.1.032.540.544
2022	Rp.342.779.461	Rp.494.251.856

*Sumber: Laporan realisasi APBDes Desa Sipai Kabupaten Mamasa*

Perhitungan rasio efisiensi Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.1.114.276.600}}{\text{Rp.1.114.276.600}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.1.032.540.544}}{\text{Rp.1.032.540.544}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.342.779.461}}{\text{Rp.494.251.856}} \times 100\% = 69,35\%$$

**Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kantor Desa Sipai****Kabupaten Mamasa**

Tahun	Realisasi belanja desa (Rp)	Realisasi pendapatan desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2020	Rp.1.114.276.600	Rp.1.114.276.600	100%	Tidak efisien
2021	Rp.1.032.540.544	Rp.1.032.540.544	100%	Tidak efisien
2022	Rp.342.779.461	Rp.494.251.856	69,35%	Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi			89,78%	Cukup efisien

Berdasarkan data dan perhitungan diatas, pada tahun 2020 realisasi belanja pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa sebesar Rp.1.114.276.600 dan realisasi pendapatannya juga sebesar Rp.1.114.276.600 sehingga rasio efisiennya yaitu 100% dan dikategorikan tidak efisien. Tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp.1.032.540.544 dan realisasi pendapatan juga sama dengan jumlah realisasi belanja, sehingga rasio efisiensinya sebesar 100% dan dikategorikan tidak efisien. Kemudian pada tahun 2022 realisasi belanja yaitu sebesar Rp.342.779.461 dan realisasi pendapatannya yaitu



Rp.494.251.856 sehingga rasio efisiennya yaitu 69,35% dan dikategorikan Efisien.

Adapun rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa adalah sebesar 89,78%. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa dalam memperoleh pendapatan sudah cukup efisien.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa dari tahun 2020-2022 cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa jika dilihat dari rasio Efektivitas, terlihat pada tahun 2020 sampai dengan 2021 kinerja keuangannya dikategorikan efektif. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan sehingga kinerja keuangan pada tahun 2022 dikategorikan tidak efektif.
2. Kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa jika dilihat dari rasio efisiensi, pada tahun 2020-2021 kinerja keuangannya dikategorikan tidak efisien. Kemudian pada tahun 2022 kinerja keuangan kembali efisien.

Dari hasil analisis menggunakan dua rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Alokasi Dana Desa Kantor Desa Sipai cukup baik meskipun pada analisis menggunakan rasio efektivitas hasilnya masih kurang efektif namun pada rasio efisiensi hasilnya cukup efisien.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa

Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa diharapkan dapat mengefektifkan dana yang ada supaya bisa dirasakan Masyarakat secara berkelanjutan sehingga desa mempunyai sumber dana sendiri.

Pemerintah Desa Sipai Kabupaten Mamasa harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Tahun ke Tahun dan diharapkan Pemerintah Desa juga meningkatkan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat melaksanakan otonomi Desa yang lebih baik.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio-rasio keuangan agar hasil penelitian lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Desa. Diharapkan juga agar menambah periode tahun anggaran yang dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Pustaka Setia.
- Malayu S.P Hasinuan. *Pengertian Manajemen Keuangan*
- Wiratna Sujarweni, (2017) *Pengertian Manajemen Keuangan*
- Musthafa, (2017). *Manajemen Keuangan*
- Kasmir, (2011). Dalam Buku "*Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan*"
- Irham Fakmi, (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*
- Armstrong dan Baron, (1998). *Analisis Kinerja Keuangan*
- Jumingan, (2014). *Dalam Buku Yang Berjudul "Kinerja Keuangan"*
- Hery (2014). *Pengertian Analisis Rasio*
- Wiratna Sujarweni (2017), *Tujuan Melakukan Analisi Rasio*
- Hehamahua, (2015). *Pengertian Desa*
- Permendes No 22 Tahun 2016 mengenai *Pengertian Desa Maju dan Pengertian Desa Berkembang*
- PP NO 60 Tahun 2014 mengenai *pengertian Kegunaan Dana Desa*
- Permendagri No 113 Tahun 2014. *Hak dan Kewajiban Keuangan Desa*
- Dian Sari, (2015). *Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- Marselina Ara Lili, (2018). dari Artikel Ilmiah. *Mengenai Alokasi Dana Desa (ADD)*
- Wijaya, (2018). *Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*
- Jan Hoseda, (2019). *Mengernai Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 9APBDes*.
- Laily, (2018). *Mengenai Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

(APBDes).

Ropa, (2016). *Pengertian Rasio Afektivitas*

Mahmudi, *Pengertian Rasio Efisiensi.*

Yuyu Sri Eka (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng .*

Mutia Sumarni, (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

Kiki Dwi Shinta, (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air batu Kabupaten Asahan.*

Rati Pundissing (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomix Volume 9 Nm0r 1.*

Arinda Puspita P, Firman Manne, & Adil Setiawan (2018-2020). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMASA. Economics Bbosowa.*

Arikunto, (2019). *Pengertian Jenis Penelitian Kuantitatif*

Sugiyono, (2017). *Pengertian Populasi dan Sampel.*

Arikunto, (2020). *Pengertian Instrumen Penelitian*

Indriantoro dsn Supomo, (2018). *Mengenai Jenis Data Kuantitatif*

Sugiyono, (2017). *Mengenai Teknik Pengumpulan Data*

## LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



## UNIVERSITAS BOSOWA

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A/2023/FEB/UNIBOS/II/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Kepala**  
**Desa Sipai Kecamatan Messawa Kab. Mamasa**

Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Kesia Karmita K  
NIM : 4519012007  
Program Studi : Manajemen  
No. Tlp/HP : 082190400949

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Desa Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Februari 2023  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



**Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM**  
**NIDN. 09 2412 680**

Tembusan  
1. Rektor Universitas Bosowa  
2. Arsip

2. Surat Izin/Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
KECAMATAN MESSAWA  
DESA SIPAI**  
Alamat : Jln Poros Sepang No... Kode Pos 91361

Sipai, 10 April 2023

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis  
Universitas Bosowa Makassar  
di –  
Makassar

Nomor : 031/58/DS.S/V/2023  
Lampiran :-  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemerintah Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian sebagai berikut:

Nama : Kesia Karmita K  
NIM : 4519012007  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen  
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Sipai Kabupaten Mamasa

Sehubungan dengan hal diatas maka Kepala Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa memberikan Izin/Rekomendasi kepada Mahasiswi tersebut untuk meneliti di Kantor Desa Sipai.

Demikian Izin/Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



### 3. Surat Keterangan Penelitian



**PEERINTAH KABUPATEN MAMASA  
KECAMATAN MESSAWA  
DESA SIPAI**  
Alamat : Jln Poros Sepang No... Kode Pos 91361

**SURAT KETERANGAN**  
No.031/58/DS.S/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa, menerangkan bahwa:

Nama : Kesia Karmita K  
NIM : 4519012007  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Keuangan

Telah melakukan penelitian pada Kantor Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa mulai tanggal 05 Maret 2023 s/d 08 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.





#### 4. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020

Lampiran Peraturan  
Nomor : 09  
Tahun : 2020

FENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIPAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>PENDAPATAN</b>							
4.2.	Pendapatan Transfer		1.125.083.930,00		1.114.276.600,00	(10.807.000,00)		
4.2.1.	Dana Desa		781.962.030,00		771.155.000,00	(10.807.000,00)		
1.2.1.01.	Dana Desa		781.962.030,00		771.155.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		285.689.030,00		285.689.000,00	0,00		
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		285.689.030,00		285.689.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		57.432.600,00		57.432.600,00	0,00		
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota		57.432.600,00		57.432.600,00	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.125.083.930,00</b>		<b>1.114.276.600,00</b>	<b>(10.807.000,00)</b>		
2.	<b>BELANJA</b>							
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>343.121.600,00</b>		<b>343.121.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		<b>337.621.600,00</b>		<b>337.621.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 Tahun	41.217.600,00	0 Tahun	41.217.600,00	0,00	ADD, PBK	
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai		41.217.600,00		41.217.600,00	0,00		
1.1.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		41.217.600,00		41.217.600,00	0,00		
1.1.01.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		41.217.600,00		41.217.600,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	234.135.000,00	0 Bulan	234.135.000,00	0,00	ADD, PBK	
1.1.02.5.1.	Belanja Pegawai		234.135.000,00		234.135.000,00	0,00		
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		234.135.000,00		234.135.000,00	0,00		
1.1.02.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		194.535.000,00		194.535.000,00	0,00		
1.1.02.5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		39.600.000,00		39.600.000,00	0,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Orang	1.584.000,00	0 Orang	1.584.000,00	0,00	ADD	

K	KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3					8	9	
2.1.0	1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		1.584.000,00		1.584.000,00	0,00	
2.1.0	1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		1.584.000,00		1.584.000,00	0,00	
2.1.0	1.1.03	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		132.000,00		132.000,00	0,00	
2.2	1.1.03	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		1.452.000,00		1.452.000,00	0,00	
2.2.0	1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPA	12 Bulan	20.485.000,00	0 Bulan	20.485.000,00	0,00	ADD
2.2.0	1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		20.485.000,00		20.485.000,00	0,00	
2.2.0	1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Barang Puriengkap		2.415.000,00		2.415.000,00	0,00	
2.2.0	1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Fis		900.000,00		900.000,00	0,00	
2.3	1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Bara 12 Cetak dan Penggandaan		1.515.000,00		1.515.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		3.070.000,00		3.070.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.070.000,00		3.070.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5 ORANG	40.200.000,00	0 ORANG	40.200.000,00	0,00	ADD
2.3.0	1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		40.200.000,00		40.200.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		40.200.000,00		40.200.000,00	0,00	
2.3.0	1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kejudukan BPD		40.200.000,00		40.200.000,00	0,00	
2.3.1	1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pencanaan, Keuangan dan Pelaporan		5.500.000,00		5.500.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdos, rembug desa No	5 kali	4.000.000,00	5 kali	4.000.000,00	0,00	ADD
2.3.1	1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Puriengkap		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Bara 12 Konsumsi (Makan/Min, m)		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APEDes, APBD 15 Perubalun, L	2 kali	1.500.000,00	2 kali	1.500.000,00	0,00	ADD
2.3.1	1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Puriengkap		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.3.1	1.4.04	5.2.1.06.	Belanja Bara 12 Konsumsi (Makan/Min, m)		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.3.1		Z.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBAHNGUNAN DESA</b>		<b>16.800.000,00</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>403.355.000,00</b>	
2.3.1		2.1	Sub Bidang Pendidikan		<b>10.800.000,00</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.1		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des	0	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0,00	DDS

Printed by Siskoung 03/12/2020 10:20:56

Halaman 2

K	KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3					8	9	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.03.		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan		<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Min/ Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Incenti	5 orang	6.000.000,00	5 orang	6.000.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.03.		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<b>0,00</b>		<b>403.355.000,00</b>	<b>403.355.000,00</b>	
2.3.08			Pemeliharaan Embung Milik Desa	0 unit	0,00	1 unit	226.030.000,00	226.030.000,00	DDS
2.3.08	5.3.		Belanja Modal		0,00		226.030.000,00	226.030.000,00	
2.3.08	5.3.7.		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		0,00		226.030.000,00	226.030.000,00	
2.3.08	5.3.7.01.		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegi		0,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
2.3.08	5.3.7.02.		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		0,00		174.415.000,00	174.415.000,00	
2.3.08	5.3.7.03.		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		0,00		46.110.000,00	46.110.000,00	
2.3.08	5.3.7.05.		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		0,00		4.405.000,00	4.405.000,00	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0 meter	0,00	1 meter	51.020.000,00	51.020.000,00	DDS
2.3.10	5.3.		Belanja Modal		0,00		51.020.000,00	51.020.000,00	
2.3.10	5.3.5.		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		0,00		51.020.000,00	51.020.000,00	
2.3.10	5.3.5.01.		Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		0,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
2.3.10	5.3.5.02.		Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		0,00		29.315.000,00	29.315.000,00	
2.3.10	5.3.5.03.		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		0,00		17.080.000,00	17.080.000,00	
2.3.10	5.3.5.04.		Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		0,00		2.200.000,00	2.200.000,00	
2.3.10	5.3.5.05.		Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		0,00		1.325.000,00	1.325.000,00	
2.3.13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Des	0 unit	0,00	2 unit	126.305.000,00	126.305.000,00	DDS
2.3.13	5.3.		Belanja Modal		0,00		126.305.000,00	126.305.000,00	
2.3.13	5.3.6.		Belanja Modal Jembatan		0,00		126.305.000,00	126.305.000,00	
2.3.13	5.3.6.01.		Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan		0,00		2.200.000,00	2.200.000,00	
2.3.13	5.3.6.02.		Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja		0,00		20.559.000,00	20.559.000,00	

Printed by Siskoung 03/12/2020 10:20:58

Halaman 3

KODE REK	URAIAN	BENCANA		MENDESAK		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		0,00		00.785.000,00	100.785.000,00	
2.3.13	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan		0,00		2.761.000,00	2.761.000,00	
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DAFURAT DAN MENDESAK DES</b>		<b>755.162.000,00</b>		<b>351.000.000,00</b>	<b>(414.162.000,00)</b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		569.738.500,00		81.000.000,00	(488.738.500,00)	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 kali	569.738.500,00		81.000.000,00	(488.738.500,00)	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000,00		81.000.000,00	31.000.000,00	
5.1.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		50.000.000,00		81.000.000,00	31.000.000,00	
5.1.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		50.000.000,00		81.000.000,00	31.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		519.738.500,00		0,00	(519.738.500,00)	
5.1.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		519.738.500,00		0,00	(519.738.500,00)	
5.1.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		519.738.500,00		0,00	(519.738.500,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		195.423.500,00		270.000.000,00	74.576.500,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	1 paket	195.423.500,00		270.000.000,00	74.576.500,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		195.423.500,00		270.000.000,00	74.576.500,00	
5.3.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		195.423.500,00		270.000.000,00	74.576.500,00	
5.3.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		195.423.500,00		270.000.000,00	74.576.500,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>1.125.083.600,00</b>		<b>1.114.276.600,00</b>	<b>(10.807.000,00)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SIPAI, 03 December 2020



## 5. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2021

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA SIPAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.092.668.400,00</b>	<b>1.032.540.544,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	715.449.000,00	715.449.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	362.861.250,00	302.733.394,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	14.358.150,00	14.358.150,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.092.668.400,00</b>	<b>1.032.540.544,00</b>	
<b>1</b>	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>374.819.400,00</b>	<b>315.091.544,00</b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	371.819.400,00	313.091.544,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	48.597.244,00	44.209.721,00	ADD, PBK
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	48.597.244,00	44.209.721,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.597.244,00	44.209.721,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.597.244,00	31.209.721,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	13.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	236.982.190,00	202.154.850,00	ADD, PBK
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	236.982.190,00	202.154.850,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.982.190,00	202.154.850,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	187.482.190,00	162.554.850,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	49.500.000,00	39.600.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	2.762.716,00	0,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	2.762.716,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.762.716,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	107.156,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.071.560,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	144.000,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	0,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	28.427.250,00	18.776.973,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.427.250,00	18.776.973,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.957.250,00	2.876.973,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.277.250,00	1.526.973,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	275.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	80.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2				
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.265.000,00	1.350.000,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	60.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.300.000,00	12.850.000,00	
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/	16.300.000,00	12.850.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.170.000,00	3.050.000,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.170.000,00	3.050.000,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	50.250.000,00	43.550.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	50.250.000,00	43.550.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	50.250.000,00	43.550.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	50.250.000,00	43.550.000,00	
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	4.400.000,00	ADD
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.400.000,00	
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.400.000,00	
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.800.000,00	4.400.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	3.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus	3.000.000,00	2.000.000,00	ADD
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	2.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>413.580.000,00</b>	<b>413.580.000,00</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N	10.800.000,00	10.800.000,00	DDS
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	80.755.920,00	80.755.920,00	
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik	4.320.000,00	4.320.000,00	DDS
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.320.000,00	4.320.000,00	
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.320.000,00	4.320.000,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bun	10.200.000,00	10.200.000,00	DDS
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.200.000,00	10.200.000,00	
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.200.000,00	10.200.000,00	
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk P	3.000.000,00	3.000.000,00	DDS
2.2.3	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
1	2					3
2.2.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	3.000.000,00	3.000.000,00	DDS	
2.2.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.2.4		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>57.235.920,00</b>	<b>57.235.920,00</b>		
2.2.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>57.235.920,00</b>	<b>57.235.920,00</b>		
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.200.000,00	9.200.000,00		
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00		
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.000.000,00	45.000.000,00		
2.2.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00		
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.035.920,00	3.035.920,00		
2.2.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.035.920,00	3.035.920,00		
2.2.9		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		DDS
2.2.9	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	6.000.000,00	6.000.000,00		
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	6.000.000,00	6.000.000,00		
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>322.024.080,00</b>	<b>322.024.080,00</b>		
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan J</b>	<b>306.302.080,00</b>	<b>306.302.080,00</b>		
2.3.10	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>306.302.080,00</b>	<b>306.302.080,00</b>		
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	306.302.080,00	306.302.080,00		
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00		
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	185.590.000,00	185.590.000,00		
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	94.555.113,00	94.555.113,00		
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	11.550.000,00	11.550.000,00		
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	12.406.967,00	12.406.967,00		
2.3.18		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</b>	<b>15.722.000,00</b>	<b>15.722.000,00</b>		
2.3.18	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.722.000,00</b>	<b>12.722.000,00</b>		
2.3.18	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.672.000,00	6.672.000,00		
2.3.18	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	910.000,00	910.000,00		
2.3.18	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.912.000,00	1.912.000,00		
2.3.18	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00		
2.3.18	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.3.18	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.3.18	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.050.000,00	1.050.000,00		
2.3.18	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.050.000,00	1.050.000,00		
2.3.18	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
2.3.18	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	3.000.000,00	3.000.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.18	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	2.400.000,00	2.000.000,00	
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.400.000,00	2.000.000,00	ADD
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.000.000,00	
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.000.000,00	
3.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	2.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>13.869.000,00</b>	<b>13.869.000,00</b>	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan /	13.869.000,00	13.869.000,00	
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.869.000,00	13.869.000,00	DDS
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.869.000,00	13.869.000,00	
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.169.000,00	5.169.000,00	
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.179.000,00	1.179.000,00	
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	300.000,00	300.000,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.575.000,00	1.575.000,00	
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.115.000,00	2.115.000,00	
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.4.1	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>288.000.000,00</b>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	288.000.000,00	
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	288.000.000,00	DDS
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	288.000.000,00	
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	288.000.000,00	
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	288.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.092.668.400,00</b>	<b>1.032.540.544,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sipai, 04 April 2022



## 6. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA SIPAI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.071.637.856,00</b>	<b>494.251.856,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	715.850.000,00	315.860.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	355.787.856,00	178.391.856,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.071.637.856,00</b>	<b>494.251.856,00</b>	
<b>1</b>	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>352.987.856,00</u></b>	<b><u>177.554.461,00</u></b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	348.987.856,00	176.554.461,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	42.573.211,00	20.360.734,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.573.211,00	20.360.734,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.573.211,00	20.360.734,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	28.573.211,00	13.360.734,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	14.000.000,00	7.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	212.204.220,00	109.359.450,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	212.204.220,00	109.359.450,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	212.204.220,00	109.359.450,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	162.704.220,00	82.959.450,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	49.500.000,00	26.400.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	6.704.148,00	1.584.000,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	6.704.148,00	1.584.000,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.704.148,00	1.584.000,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	321.468,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.654.680,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	288.000,00	144.000,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	34.206.277,00	18.400.277,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.206.277,00	18.400.277,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.396.277,00	3.330.277,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.356.277,00	1.325.277,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	485.000,00	275.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	80.000,00	80.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	2.415.000,00	1.590.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	60.000,00	60.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.250.000,00	9.200.000,00	
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/	17.250.000,00	9.200.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.560.000,00	5.870.000,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.560.000,00	5.870.000,00	
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>46.900.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>46.900.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	46.900.000,00	23.450.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	46.900.000,00	23.450.000,00	
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.400.000,00	3.400.000,00	
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.400.000,00	3.400.000,00	
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.4.2		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	1.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>254.705.000,00</b>	<b>17.225.000,00</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	
2.1.1		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nc</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>DDS</b>
2.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	4.500.000,00	
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	4.500.000,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>67.468.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bur</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>DDS</b>
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.200.000,00	4.250.000,00	
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.200.000,00	4.250.000,00	
2.2.4		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>57.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>
2.2.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>57.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.500.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.500.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.000.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	42.000.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	768.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	768.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>147.427.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan J</b>	<b>136.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>
2.3.10	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>136.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	136.402.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	78.980.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.925.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.297.000,00	0,00	
2.3.18		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	<b>DDS</b>
2.3.18	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.18	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.425.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	625.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	600.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	600.000,00	0,00	
2.3.18	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	
2.3.18	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bt	9.000.000,00	8.475.000,00	
2.3.18	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	9.000.000,00	8.475.000,00	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.6		<b>Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum di</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>
2.4.6	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	29.010.000,00	0,00	
2.4.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	15.624.500,00	0,00	
2.4.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	12.957.400,00	0,00	
2.4.6	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	428.100,00	0,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
3.1.1		<b>Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>ADD</b>
3.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	400.000,00	
3.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	0,00	
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	400.000,00	400.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>165.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>13.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2				
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	13.480.000,00	0,00	DDS
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	0,00	
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	13.480.000,00	0,00	
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	13.480.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	131.465.000,00	0,00	
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produks	14.400.000,00	0,00	DDS
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	0,00	
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.400.000,00	0,00	
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	14.400.000,00	0,00	
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Iriga:	117.065.000,00	0,00	DDS
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	117.065.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per:	117.065.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tin	1.100.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten	79.635.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba	31.860.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administr	4.470.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	0,00	
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.500.000,00	0,00	DDS
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.500.000,00	0,00	
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.500.000,00	0,00	DDS
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.500.000,00	0,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA</b>	<b>295.200.000,00</b>	<b>147.600.000,00</b>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	147.600.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	147.600.000,00	DDS
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	147.600.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	147.600.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	147.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.071.637.856,00</b>	<b>342.779.461,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	<b>151.472.395,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	151.472.395,00	

Sipai, 18 August 2022

